

## Analogi Implementasi Pilar SDG's Ke-15 (Forest City) di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pipit Afrianti<sup>a</sup>, Desie Andreastuti<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Universitas Mulawarman

<sup>b</sup>Universitas Mulawarman

e-mail : <sup>a</sup> [pipitafrianti93@gmail.com](mailto:pipitafrianti93@gmail.com) , <sup>b</sup> [andreastutidesie@gmail.com](mailto:andreastutidesie@gmail.com)

### Abstrak

*Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 pilar utama sebagai tujuan terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang menyetujui untuk menerapkan SDGs sebagai acuan pembangunan dan kebijakan berkelanjutan dengan target capaian pada tahun 2030. salah satu upaya untuk mewujudkan SDGs di Indonesia adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berfokus pada tujuan SDGs ke-15, yaitu tujuan melindungi dan melestarikan kehidupan daratan (Life on Land). Artikel ini memaparkan analogi pembangunan IKN untuk mewujudkan pilar ke-15 SDGs tersebut dengan menggunakan literatur review dari berbagai sumber. Sejalan dalam pembangunannya, IKN telah merencanakan berbagai konsep yang sesuai dengan tujuan SDGs ke-15, yaitu Kota hutan (Forest City) untuk meminimalisir kerusakan ekosistem flora dan fauna, merestorasi ekosistem hutan dan ruang terbuka hijau, serta tentunya melibatkan masyarakat sekitar dalam melestarikan alam. Namun ditemukannya juga dampak lain dari konsep tersebut diantaranya terusirnya suku asli Kalimantan dan hewan endemik yaitu orang utan serta meningkatnya urbanisasi ke kota penyangga IKN.*

**Kata Kunci:** SDGs; IKN; Forest City.

## ***Analogy of Implementation of the 15th SDG's Pillar (Forest City) in Indonesian New Capital (IKN)***

### ***Abstract***

*Sustainable Development Goals (SDGs) is a program initiated by the United Nations in 2015. SDGs have 17 main pillars as goals for realizing sustainable development for countries in the world. Indonesia is one of the countries that has agreed to implement SDGs as a reference for sustainable development and policy with a target of achievement by 2030. One of the efforts to realize SDGs in Indonesia is the Development of the Indonesian New Capital (IKN) which focuses on the 15th SDGs goal, namely the goal protect and preserve land life (Life on Land). This article explains the analogy of IKN development to realize the 15th pillar of the SDGs using review literature from various sources. In line with its development, IKN has planned various concepts that are in line with the 15th SDGs goal, namely Forest City to minimize damage to flora and fauna ecosystems, restore forest ecosystems and green open spaces, and of course involve local communities in preserving nature. However, other impacts of this concept were also discovered, including the expulsion of indigenous Kalimantan tribes and endemic animals, namely orangutans, as well as increasing urbanization into cities supporting IKN.*

**Keywords:** SDGs; IKN; Forest City.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

## A. PENDAHULUAN

Pada sidang tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI tahun 2019 Presiden Joko Widodo mengutarakan maksud dan tujuannya kepada para lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan, salah satu hal yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota adalah melihat beban DKI Jakarta yang semakin hari semakin berat tatkala Jakarta tidak hanya menjadi pusat bisnis dan pemerintahan, namun juga pertumbuhan penduduk yang semakin sesak dan tata kelola kota yang telah sulit diatur, maka pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan menjadi solusi agar dapat membantu mengurangi beban kota Jakarta. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan kota di Indonesia, dimana masyarakat sering menganggap bahwa pembangunan oleh pemerintah seakan mengandung unsur diskriminasi dimana pembangunan hanya berfokus pada pulau Jawa saja atau disebut dengan istilah “Jawa Sentris”.

Pemerintah berharap dengan pemindahan ibu kota negara ini selanjutnya tidak ada lagi anggapan masyarakat bahwa pembangunan Indonesia hanya berorientasi di pulau Jawa saja, namun juga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat lebih merata menjadi “Indonesia Sentris”.

Proses pemindahan Ibu Kota Negara tersebut secara resmi dimulai saat disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada awal tahun 2022 yang kemudian di namai dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, terdapat masyarakat yang mendukung dan yang kontra terkait pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Masyarakat yang menolak IKN beranggapan bahwa pemindahan ibu kota negara tersebut justru akan menambah kerusakan lingkungan yang berada pada hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia yang dikenal dunia sebagai Borneo dan salah satu

pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi salah satunya hewan asli Kalimantan yaitu Orangutan, serta akan mengganggu kehidupan komunitas adat yang ada di wilayah pembangunan IKN.

Hal pertama yang terjadi saat pemindahan IKN adalah penebangan hutan yang masif dan kerusakan habitat satwa sekitar. Potensi kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan, penanaman sawit, dan aktivitas industri pertambangan akan menambah kerusakan yang semakin besar jika perencanaan dan implementasi pembangunan IKN tidak dilakukan secara komprehensif.

Dampak pembangunan IKN tidak hanya terkait pada aspek kerusakan alam, pemindahan Ibu Kota juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat khususnya masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN serta dapat menimbulkan masalah juga pada kota-kota penyangga IKN.

Konsep pembangunan IKN yang begitu mewah dan elit akan menimbulkan potensi adanya kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan penduduk yang akan pindah ke IKN jika pembangunan IKN tidak diiringi dengan pertimbangan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ibukota negara, maka perlu diterapkan dan dimasukkan juga prinsip pembangunan berkelanjutan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang juga turut mengadopsi Resolusi Sidang Umum PBB A/RES/70/1 *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015.

Seperti diketahui sustainable development atau pembangunan berkelanjutan menurut Brundlant Report tahun 1987 adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pembangunan IKN adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Perpindahan ibu kota negara yang baru pasti berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kota serta pembangunan yang menunjang ibu kota baru seperti perkantoran, fasilitas negara dan fasilitas umum. Perpindahan ibu kota ini juga menjadi bagian dari pemerataan pembangunan (Nurparikha et al., 2023), dan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk lebih diberdayakan (Anomsari dan Abubakar, 2019). Jika tidak dilakukan dengan baik maka hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan serta kehidupan flora dan fauna di Kalimantan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 2015. Program ini memiliki 17 pilar tujuan utama pembangunan berkelanjutan sebagai himbuan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan upaya dari SDGs dalam mewujudkan negara yang sejahtera, dimana hal ini juga berlaku pada konteks lokal sampai yang terkecil seperti di desa (Afandi et al., 2021; Pradesa et al., 2022; Pradesa dan Agustina, 2021). Dalam pembangunannya IKN tentunya harus menerapkan SDGs untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam jurnal *“Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”* oleh Roy Armansyah, dkk (2024) bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mengembangkan lahan hijau minimal 60%, energi terbarukan, membangun infrastruktur ramah lingkungan seperti trotoar, jalur sepeda, dan transportasi umum yang minim emisi karbon.

Jurnal selanjutnya membahas mengenai *“Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara”* oleh Yanti Fristikawati, dkk (2022). Dalam jurnal tersebut pembangunan ibukota negara Nusantara dalam

perencanaannya telah mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dimana dalam pembangunannya tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berbagai hal telah dipersiapkan seperti penggunaan sumber daya dan energi yang digunakan, pemulihan lingkungan dan rencana transportasi masal. Kesenjangan ekonomi diharapkan dapat diperkecil dengan hadirnya Ibukota Nusantara, serta masyarakat sekitar dapat ditingkatkan taraf hidupnya atau kesejahteraannya. Saat ini lahan yang akan dibangun IKN masih harus dipulihkan, karena sering terjadi banjir akibat perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau kegiatan penambangan batu bara.

Pada situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia diutarakan bahwa Ibu kota negara baru mengusung konsep dengan memperhatikan lingkungan dan ekosistem sekitar. Terdapat konsep IKN yang sesuai dengan tujuan SDGs ke-15, yaitu IKN dirancang menjadi Kota hutan (*Forest City*) untuk meminimalisir kerusakan ekosistem flora dan fauna, merestorasi ekosistem hutan dan ruang terbuka hijau, serta tentunya melibatkan masyarakat sekitar dalam melestarikan alam, terdapat pula pembangunan infrastruktur satwa dengan pembangunan jembatan yang berada di atas jalan tol IKN. Ketercapaian IKN ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-15 yang berfokus pada keberlanjutan ekosistem darat dengan mengusung konsep *Forest City*.

Studi literatur terdahulu menunjukkan bahwa IKN pada masa yang akan datang dapat menjadi ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang dirancang khusus sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif dan berkelanjutan jika pilar SDGs ke-11 yaitu kota pemukiman berkelanjutan dan pilar SDGs ke-15 yaitu mengenai ekosistem daratan dapat dipenuhi dengan baik. Pada artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana analogi SDGs pilar ke-15 bila di implementasikan pada pembangunan IKN sebagai *Forest City*. Dapatkah konsep *Forest City* tersebut diterapkan dengan baik

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan adakah dampak yang ditimbulkan dari pembangunan IKN selain pada dampak kerusakan hutan dan kerusakan habitat hewan endemik Kalimantan yaitu orangutan. Analogi implementasi SDGs yang ke-15 di IKN ini dapat menjadi saran bagi Otoritas IKN dalam pembangunan IKN yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Pulau Kalimantan, memiliki potensi besar untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs ke-15 yaitu “Kehidupan di Daratan” yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Berikut adalah paparan hubungan antara pengembangan IKN dan SDGs ke-15, dengan menggunakan contoh dan analogi praktis.

### 1. Lokasi dan Sensitivitas Lingkungan

Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang sangat bernilai tinggi di mata dunia, rumah bagi hutan hujan yang luas, suka spesies unik seperti orangutan, dan berbagai macam ekosistem penting lainnya. Kalimantan diibaratkan sebagai “rumah kaca” besar yang dipenuhi tanaman langka dan memiliki wilayah suka satwa yang berfungsi melindungi satwa dari gangguan apa pun yang dapat mempengaruhi keseluruhan ekosistem.

Pembangunan IKN mempunyai potensi risiko terhadap “rumah kaca” ini, Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pembangunan konstruksi dapat menyebabkan deforestasi, perusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga bertentangan dengan tujuan SDGs ke-15. Namun, dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, IKN juga dapat menjadi model untuk menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan pelestarian lingkungan.

### 2. Perencanaan Kota Berkelanjutan

Pembangunan kota pada setiap keputusan kebijakannya akan memberikan dampak pada lingkungan. Jika disinergikan dengan tujuan SDGs ke-15, maka pembangunan IKN dapat menunjang perwujudan tersebut dalam beberapa bentuk seperti:

- **Mengintegrasikan Ruang Hijau:** Dengan menyertakan taman, hutan, dan kawasan konservasi yang luas di areal kota, pembangunan IKN dapat tetap melestarikan habitat alami dan meningkatkan keanekaragaman hayati meski berada di dekat pemukiman manusia.

- **Meminimalkan dampak Penggunaan Lahan:** Rancangan pembangunan yang matang, efektif, dan efisien dapat mengurangi penggunaan lahan yang tidak urgen diperlukan, sehingga dapat melestarikan lebih banyak lahan untuk ekosistem alami di perimeter IKN. Hal ini disinergikan dengan pembangunan taman kota yang memastikan sebagian besar ruang dibiarkan untuk alam.

- **Infrastruktur Berkelanjutan:** Penggunaan material ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan sistem transportasi berdampak rendah (seperti bus listrik dan sepeda) akan semakin melindungi lahan di sekitarnya. Pendekatan ini memilih bahan-bahan untuk model yang relatif aman dan tahan lama guna memastikan lingkungan tidak rusak dalam jangka panjang

### 3. Inisiasi Reboisasi, Konservasi, dan Zonasi

IKN dapat berkontribusi aktif terhadap pilar SDGs ke-15 yakni sebagai perwujudan kota yang memiliki kawasan konservasi. Beberapa upaya yang bisa ditempuh di antaranya:

- **Program Reboisasi:** Penanaman kembali pohon dan restorasi lahan terdegradasi di sekitar IKN dapat mengimbangi dampak lingkungan dari pembangunan. Jika diibaratkan IKN adalah manusia dan Kalimantan sebagai taman, maka program reboisasi adalah penanaman kembali bagian taman yang telah terinjak, dan memastikan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

taman tersebut dapat tumbuh kembali secara kuat.

- **Program Konservasi:** Penetapan kebijakan hutan di sekitarnya sebagai kawasan lindung dapat mencegah deforestasi serta dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Ini diibaratkan seperti memagari area-area taman agar tidak diganggu, sehingga tanaman dan hewan (terutama yang langka) dapat tumbuh subur tanpa gangguan.

#### 4. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat sekitar IKN, termasuk masyarakat adat, memiliki peran dan fungsi sebagai konservator. Pengetahuan dan praktik hidup masyarakat adat sangat penting dalam menjaga kesehatan lahan. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam perencanaan dan upaya konservasi dapat membantu menyelaraskan pembangunan dengan pengetahuan dan praktik ekologi tradisional yang telah melestarikan ekosistem Kalimantan selama berabad-abad lamanya.

Masyarakat adat mungkin mengetahui tanaman dan pohon mana yang penting bagi ekosistem lokal dan cara memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam rencana pengembangan IKN dapat meningkatkan keberlanjutan kota dan kontribusinya terhadap terwujudnya *Forest City*.

#### 5. Analisis Dampak Lingkungan

Dengan menerapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat dan pemantauan terus menerus, IKN dapat memastikan bahwa pembangunannya selaras dengan pilar SDGs ke-15. Proses ini melibatkan evaluasi potensi dampak terhadap tanah, air, dan keanekaragaman hayati sebelum konstruksi dimulai dan menyesuaikan rencana untuk masa yang akan datang.

Penggunaan teknologi seperti citra satelit, drone, dan teknologi lainnya digunakan untuk pemantauan lingkungan yang dapat memberikan data real-time tentang bagaimana pertumbuhan kota berdampak pada ekosistem

di sekitarnya. Penggunaan sensor wilayah juga dapat memperingatkan pemerintah jika ada bagian yang digunakan secara berlebihan atau ada protokol yang diabaikan

#### 6. Pendidikan dan Kesadaran

Sebuah taman bisa tumbuh subur bukan hanya tergantung dari cara penanamannya, tapi juga dari seberapa baik perawatannya. Dengan menanamkan pendidikan lingkungan hidup dan praktik keberlanjutan dalam pembangunan IKN, mulai dari sekolah hingga program kemasyarakatan, dapat menumbuhkan generasi yang menghargai dan berkontribusi aktif terhadap perlindungan dan pemulihan kehidupan di darat. Meskipun potensi IKN untuk berkontribusi pada terwujudnya pilar SDGs ke-15 cukup besar, namun terdapat beberapa tantangan yang signifikan, di antaranya:

- **Menyeimbangkan Pembangunan**

Kebutuhan untuk menciptakan ibu kota yang berfungsi dengan tetap menjaga ekosistem alam memerlukan perencanaan yang matang dan kebijakan politik yang kuat.

- **Menghindari *Greenwashing***

Istilah *greenwashing* pertama kali digunakan oleh Jay Westerveld pada tahun 1980-an yang menyiratkan praktik tidak jujur (baik informasi ataupun klaim palsu) yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk menyatakan diri mereka berperan aktif dalam menjaga keasrian lingkungan dan jasa/produk mereka ramah lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan dari pihak perusahaan/pelaku usaha didukung oleh praktik yang tulus dan tidak hanya digunakan untuk tujuan pencitraan dan pelulusan izin.

- **Mengelola Pertumbuhan Penduduk**

Seiring dengan pertumbuhannya, kebutuhan akan sumber daya di IKN juga akan meningkat, sehingga penting untuk mengembangkan strategi yang meminimalkan dampak lingkungan sekaligus mengakomodasi penduduk baru. Salah satu dampak yang akan muncul adalah meningkatnya angka urbanisasi

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

di kota-kota penyangga IKN yang selanjutnya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, sehingga perlunya regulasi yang efektif untuk menekan urbanisasi yang masif.

Pengelolaan kota ramah lingkungan dalam konteks pembangunan perkotaan skala besar, seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kebutuhan pertumbuhan perkotaan. Hal ini melibatkan serangkaian pendekatan strategis untuk memastikan upaya-upaya penghijauan berhasil dan berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan kota. Beberapa pendekatan strategis tersebut di antaranya:

## 1. Perencanaan Kota Terpadu dan Infrastruktur Ramah Lingkungan

Pembangunan perkotaan biasanya melibatkan perubahan penggunaan lahan yang signifikan, yang dapat menyebabkan hilangnya habitat dan gangguan ekosistem. Hal tersebut dapat diseimbangkan dengan upaya reboisasi yang memerlukan integrasi unsur-unsur alam ke dalam desain perkotaan sejak awal. Alternatif metode yang bisa digunakan selain menerapkan Infrastruktur Hijau yaitu dapat menerapkan desain Biofilik.

Desain biofilik mengintegrasikan elemen alam ke dalam bangunan dan lanskap perkotaan. Contoh ideal dari metode ini adalah perwujudan Gardens by the Bay di Singapura. Singapura, meskipun berukuran kecil dan berpenduduk padat, terkenal dengan pendekatan "Kota dalam Taman", yang mana pembangunan perkotaan terintegrasi erat dengan alam. Singapura juga telah berkomitmen untuk memperluas ruang hijaunya, dalam bentuk taman, kebun, dan jalan yang dipenuhi deretan pepohonan di seluruh lanskap kotanya.

Kebijakan pemerintah Singapura yakni Urban Redevelopment Authority (URA) memasukkan ruang hijau ke dalam semua pembangunan baru. Kota ini memiliki kebijakan yang mewajibkan penyertaan penghijauan dalam

proyek pemerintah dan swasta, seperti taman atap dan penghijauan vertikal pada bangunan.

Contoh integrasi ruang hijau ke dalam tatanan perkotaan mereka adalah Gardens by the Bay, yang merupakan taman alam seluas 101 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru hijau kota sekaligus menjadi daya tarik pariwisata. Bagi IKN yang mengusung konsep *Forest City*, hal serupa dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan kota, seperti koridor hijau dan zona pohon, hutan vertikal pada bangunan, atap hijau, dan wilayah hijau yang menghubungkan IKN dengan ekosistem alam sekitar. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan kota tidak mengorbankan alam, namun malah bersinergi dan melestarikannya

## 2. Zonasi dan Tata Guna Lahan

Memastikan kawasan yang dihutankan kembali terlindungi dari perluasan kota dan perambahan ilegal merupakan sebuah tantangan yang krusial. Alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi permasalahan tersebut di antaranya adalah Peraturan Zonasi dan Zona Penyangga.

Peraturan Zonasi melibatkan penetapan kawasan tertentu untuk pembangunan, konservasi, dan pemanfaatan campuran, serta memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak mengganggu kawasan hutan atau kawasan alami. Zona penyangga dapat berperan sebagai daerah peralihan antara daerah perkotaan dan daerah yang ditumbuhi hutan. Contoh ideal dari penetapan kebijakan ini adalah Kebijakan Zonasi Curitiba.

Curitiba, Brasil, terkenal dengan perencanaan kotanya yang berpikiran maju. Kebijakan zonasi kota mencakup jalur hijau yang luas dan lahan taman yang dilindungi dari pembangunan perkotaan. Kawasan ini berperan sebagai penyangga yang melestarikan habitat alami dan menyediakan ruang hijau bagi warga.

Contoh lainnya adalah Inisiatif Kota Hutan Tiongkok. Tiongkok telah meluncurkan beberapa proyek reboisasi dan urbanisasi hijau yang ambisius, seperti Kota Hutan Liuzhou, yang dirancang untuk memerangi polusi udara

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan memulihkan lanskap yang terdegradasi. Proyek Kota Hutan Liuzhou, yang dirancang oleh Stefano Boeri Architetti, bertujuan untuk menciptakan kota yang bangunannya ditutupi pepohonan dan tanaman, sehingga secara efektif mengintegrasikan kawasan hutan ke dalam lingkungan perkotaan.

### 3. Keterlibatan Masyarakat dan Pengelolaan Bersama

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan program penghijauan memastikan bahwa kebutuhan dan pengetahuan mereka diintegrasikan ke dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan setempat. Contoh pendekatan ini di antaranya adalah Program Kehutanan Masyarakat Kamerun. Pemerintah Kamerun telah memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola dan mengambil manfaat dari hutan. Program-program ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan mereka menggunakan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan hasil konservasi hutan yang lebih baik. Pada pembangunan IKN pendekatan partisipatif serupa dapat digunakan, dimana masyarakat lokal dan adat dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan upaya reboisasi. Hal ini dapat mencakup program pelatihan, pembibitan yang dikelola masyarakat, dan mekanisme pembagian manfaat yang memberikan insentif ekonomi untuk mempertahankan kawasan yang dihutankan kembali.

### 4. Insentif Ekonomi untuk Konservasi

Reboisasi membutuhkan biaya yang besar, dan seringkali terdapat tekanan ekonomi untuk mengubah lahan hutan menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan, seperti pertanian atau pengembangan real estat. Alternatif solusi atas permasalahan ini adalah Pembayaran Jasa Ekosistem (*Payments of Environmental Services/PES*) dan Obligasi Ramah Lingkungan.

Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) melibatkan pemberian kompensasi kepada pemilik tanah atau masyarakat atas pemeliharaan atau peningkatan jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan, seperti penyerapan karbon, pemurnian air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Obligasi ramah lingkungan (*green bonds*) adalah instrumen keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek lingkungan hidup, termasuk reboisasi. Contoh ideal keberhasilan solusi ini adalah Program PES di Costa Rica

Costa Rica telah berhasil menerapkan program PES di mana pemilik tanah dibayar untuk melestarikan hutan, yang telah menghasilkan reboisasi besar-besaran dan perlindungan keanekaragaman hayati. Program ini dikelola oleh Dana Nasional untuk Pembiayaan Hutan, yang memberikan pembayaran kepada pemilik lahan berdasarkan jasa ekosistem yang diberikan oleh lahan mereka. Hasilnya, program PES telah berkontribusi terhadap peningkatan tutupan hutan secara signifikan dan membantu negara ini menjadi pemimpin global dalam bidang konservasi. Program ini juga telah meningkatkan penghidupan masyarakat pedesaan, menghubungkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan

IKN dapat menerapkan skema PES yang memberi insentif pada reboisasi dan konservasi hutan. Selain itu, penerbitan obligasi ramah lingkungan dapat mengumpulkan dana untuk proyek reboisasi skala besar, sehingga memastikan bahwa upaya ini didanai dengan baik dan menarik bagi investor. Hal ini akan menciptakan struktur insentif keuangan yang menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan

### 5. Integrasi Teknologi

Memantau upaya reboisasi skala besar dan memastikan kepatuhan terhadap tujuan konservasi merupakan suatu tantangan, terutama di wilayah terpencil atau susah dijangkau. Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah penggunaan Drone,

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Citra Satelit, dan *AI Analyze*. Teknologi modern dapat memainkan peran penting dalam memantau upaya reboisasi, menilai kesehatan hutan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Drone dan citra satelit dapat menyediakan data tutupan hutan secara real-time, sementara AI dapat menganalisis data tersebut untuk mendeteksi aktivitas ilegal atau tanda-tanda degradasi hutan. Contoh ideal dari penggunaan sistem ini adalah Sistem Deteksi Deforestasi Real-Time (DETER) di Brazil. Sistem DETER Brazil menggunakan citra satelit untuk memantau deforestasi di hutan hujan Amazon. Sistem ini memberikan peringatan real-time kepada pihak berwenang, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap aktivitas deforestasi ilegal.

IKN dapat mengembangkan sistem pemantauan serupa dengan menggunakan drone dan teknologi satelit untuk mengawasi kawasan reboisasi. AI dapat digunakan untuk menganalisis data, memprediksi potensi ancaman, dan mengoptimalkan praktik reboisasi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa upaya reboisasi terlacak dan terlindungi, dengan respons cepat terhadap perambahan ilegal atau ancaman lingkungan.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pengelolaan kota ramah lingkungan, terutama pada skala besar seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan perkotaan dengan konservasi lingkungan. Beberapa strategi yang dapat diadopsi meliputi integrasi desain biofilik dan infrastruktur hijau untuk menciptakan hubungan harmonis antara alam dan kota. Contoh penerapan konsep ini terlihat dari keberhasilan Singapura dan inisiatif Forest City di IKN dapat memanfaatkan pendekatan serupa dengan mengintegrasikan ruang hijau di seluruh kota, melalui zonasi hijau dan penghijauan vertikal. Zonasi yang bijaksana juga diperlukan untuk melindungi kawasan yang dihutankan kembali dari ekspansi kota dan perambahan ilegal.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam menjamin keberhasilan jangka panjang program penghijauan. Pendekatan partisipatif, seperti yang dilakukan dalam program kehutanan masyarakat di Kamerun, memastikan keberlanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan, upaya konservasi tidak hanya akan lebih inklusif, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan setempat. Program reboisasi di IKN dapat memanfaatkan tenaga masyarakat untuk pengelolaan lahan dan pembagian manfaat ekonomi secara langsung. Terakhir, insentif ekonomi dan teknologi canggih harus digunakan untuk memastikan keberlanjutan upaya konservasi. Skema *Payment for Ecosystem Services* (PES) dan penerbitan obligasi hijau dapat memberikan dana dan insentif bagi reboisasi. Teknologi seperti drone dan citra satelit juga memainkan peran penting dalam memantau upaya ini dan mendeteksi ancaman secara real-time. Integrasi teknologi ini akan memastikan bahwa pembangunan di IKN tetap selaras dengan tujuan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

### REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Agungnoe. (2023b, April 4). Mengupas Keselarasan Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara Baru dengan SDGs. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/22328-mengupas-keselarasan-konsep-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-dengan-sdgs/>
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 –

138.  
<https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Armansyah, R. (2024). Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. In Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara: Vol. Vol.2 (Issue No.1, pp. 255-266).  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.879>
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA. In e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 5, Issue 2, pp. 739-740).
- Iskandar, AH (2022). SDGS DESA: Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (Versi Bahasa Inggris). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KPBU - Ibu Kota Negara Baru : Integrasi Infrastruktur dan Kelestarian Alam. (n.d.). KPBU. Retrieved January 25, 2024, from <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam>
- Negara, K. S. (n.d.). Ketercapaian Ibu Kota Nusantara dengan Tujuan SDGs ke-15 Terkait Ekosistem Darat | Sekretariat Negara. [https://www.setneg.go.id/baca/index/ketercapaian\\_ibu\\_kota\\_nusantara\\_dengan\\_tujuan\\_sdgs\\_ke\\_15\\_terkait\\_ekosistem\\_darat](https://www.setneg.go.id/baca/index/ketercapaian_ibu_kota_nusantara_dengan_tujuan_sdgs_ke_15_terkait_ekosistem_darat)
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413.  
<http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Pradesa, H.A., Agustina, I. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 8 (2), 159 - 168.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40.  
<https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.84>.
- Suhariyanto, D., Said, D. A., Budiati, I., Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>
- Tujuan 15: Ekosistem Darat - Sustainable Development Goals Center - Universitas Brawijaya. (n.d.). Sustainable Development Goals Center - Universitas Brawijaya. Retrieved January 25, 2024, from <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-15-menjaga-ekosistem-darat/>